

# PEMERATAAN PENDIDIKAN ANAK BANGSA: PENDIDIKAN GRATIS VERSUS KAPITALISME PENDIDIKAN

Mujahidun

## ABSTRAK

*Pendidikan adalah salah satu pemutus tali kemiskinan. Tetapi apakah setiap warga negara telah mengenyam pendidikan hingga ke jenjang yang paling tinggi? Bagaimana dengan program education for all? Konsepsi dasar pemerataan pendidikan yang ditujukan kepada equality in education dan equity in education nampaknya belum beriringan bahkan bisa dikatakan saling berseberangan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Asas educational for all yang sering digaungkan juga masih berhadapan dengan perlakuan deskriminasi masyarakat atas dasar golongan dan status dalam memperoleh keadilan dan kesempatan pendidikan. Berbagai asumsi diketengahkan mulai dari kebijakan pemerintah yang dinilai sering berganti-ganti, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih belum optimal, proses penyelenggaraan pendidikan yang dirasa begitu mahal, dan disisi lain propaganda kebijakan pendidikan gratis menawarkan angan-angan masyarakat yang terkadang tidak sejalan dengan realitas biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Tulisan ini hendak membicarakan sekelumit pertentangan antara kebijakan pendidikan gratis dengan praktik kapitalisme pendidikan yang sering dijumpai di tengah arus globalisasi dan di tengah tuntutan stakeholder akan pentingnya pendidikan.*

**Kata kunci** : pemerataan pendidikan, pendidikan gratis dan kapitalisme pendidikan

## A. PENDAHULUAN

Pergeseran transformasi kehidupan manusia akibat globalisasi membawa konsekuensi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manusia yang dilahirkan dari proses pendidikan sangat bergantung dari corak dan jenis pendidikan yang dijalankan. Corak dan jenis pendidikan akan ditentukan oleh kebijakan pemerintah, peran masyarakat dan peran praktisi pendidikan. Namun demikian keterlibatan pemerintah berada lebih dari pada keterlibatan masyarakat dan para praktisi pendidikan, karena pada hakekatnya kebijakan pemerintah menjadi domininan dalam menjalankan proses pendidikan.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu semua warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali (UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 25 Tahun

2005). Dari sinilah pemerintah dituntut untuk mewujudkan pemerataan di bidang pendidikan. Salah satu gerakan yang dilakukan oleh pemerintah yakni program wajib belajar 9 tahun melalui yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2006. Untuk itu tujuan pendidikan diletakkan pada tiga pilar, yaitu (1) pemerataan kesempatan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; serta (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Di tengah program wajib belajar sedang berjalan, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pendidikan gratis. Kebijakan ini sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 oleh banyak kalangan dinilai sebagai kebijakan yang bernuansa politis. Akibatnya kebijakan tersebut kurang bermakna bagi pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Apalagi iklan “pendidikan gratis” telah membawa anggapan bagi masyarakat untuk tidak mengeluarkan biaya sepeser pun padahal dalam kenyataannya tidak demikian. Sebab berbagai biaya pendidikan mulai dari uang pendaftaran, biaya buku, sumbangan pembangunan dan lain-lainnya membuat para orang tua yang miskin tercekik dengan pembayaran tersebut. Hal ini dikhawatirkan akan menambah banyak anak yang putus sekolah karena tidak mampu membiayai pendidikannya.

Di sisi lain reformasi di Indonesia yang seakan menjadi cahaya impian bagi semua perubahan tidak terkecuali pada sektor pendidikan, dan juga dengan adanya perubahan paradigma sentralisasi menuju desentralisasi yang kemudian disusul dengan regulasi pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah justru tidak sedikit menimbulkan persoalan baru. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan kebijakan pemerintah pusat (pendidikan gratis) diseduaikan dengan kondisi dan situasi keberadaan daerah yang ada.

Persoalan baru yang dimungkinkan akan muncul adalah sikap *ambiguitas* dan *goal setting* masing-masing wilayah pendidikan yang saling bersebarangan. Tuntutan agar peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada semua lapisan, pemenuhan pemerataan pendidikan, dan lain-lain memaksa pemerintah daerah agar turut serta meningkatkan penyelenggaraan pendidikan. Persoalan lainnya adalah tuntutan dunia usaha dan

dunia industri (DUDI) dan stakeholder berupa peningkatan kompetensi lulusan sekolah yang siap kerja. Hal ini tentu akan berdampak pada pola pendidikan, di mana sekolah harus mampu merancang program unggulan. Karena persaingan antar sekolah semakin meningkat, maka sejumlah tawaran, ramuan, sajian dan program unggulan saling dipamerkan bahkan dengan biaya pendidikan yang semakin mahal pula. Tentu hal ini akan mengakibatkan *elitisme* pendidikan bertebaran kian menjadi. Pendidikan kini menjadi ajang bisnis yang hanya akan dimiliki oleh kaum kapitalisme. Mereka para kaum kapitalisme akan memanfaatkan slogan/jargon/atau embel-embel “sekolah terpadu, unggulan, plus dan Islam terpadu” hanya untuk menarik simpati dan menjadi alat penarik jitu dalam meraup keuntungan dari calon peserta didik baru.

Tulisan ini dipandang masih urgen untuk diperbincangkan dengan asumsi, *pertama* salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah melalui penciptaan dan peningkatan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara. *Kedua*, tidak seluruhnya anak bangsa dapat mengenyam pendidikan yang dikarenakan akses pendidikan belum menjangkau juga karena tidak bisa memenuhi biaya pendidikan sehingga menyebabkan putus sekolah. *Ketiga*, praktik penyelenggaraan pendidikan mudah digiring ke dalam praktik komersialisme yang sekedar menghitung untung rugi dengan dalih mahalnnya sarana prasarana pendidikan. *Keempat*, patokan awal dalam menilai pemerataan pendidikan yakni jika angka partisipasi murni (APM) anak usia wajib belajar 9 tahun, yaitu 7 – 15 tahun telah mencapai minimal 95% setiap tahunnya.

Menengok Data Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2004, dari penduduk usia sekolah 7–24 tahun berjumlah 76,0 juta orang, dan bisa sekolah dari jenjang SD - PT tercatat 41,5 juta orang (55%). Sementara itu, menurut data Balitbang Depdiknas 2004, angka putus sekolah (*drop-out*) di tingkat SD/MI tercatat sebanyak 685.967 anak, yang berhasil lulus SD/MI tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMP/MTs dan putus sekolah di tingkat SMP/MTs sebanyak 759.054 orang. Pada Tahun 2009 jumlah anak putus sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) berkisar 483 ribu anak. Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional, Hamid Muhammad Saat ini (tahun 2009), sedikitnya 8,3 juta

orang Indonesia masih buta aksara atau tidak bisa menulis dan membaca huruf latin. Lebih dari separuhnya perempuan dan didominasi usia 45 tahun ke atas. “Kalau tidak terus menerus di eliminasi, kantung-kantung buta aksara bisa terus bertambah. Dan karena buta aksara akan melahirkan kemiskinan pun demikian disebabkan oleh kemiskinan yang pada akhirnya melahirkan generasi miskin yang buta aksara – kemiskinan terstruktur.

Kebijakan pemerintah menetapkan kenaikan APBN di bidang pendidikan sebesar 20% ternyata belum mampu menambah akses pendidikan yang memungkinkan semua warga dapat memperoleh kesempatan berpendidikan. Masih banyaknya anak bangsa tidak mampu merasakan bangku sekolah bukan karena didorong oleh kebijakan pendidikan gratis atau sebaliknya bukan pula karena biaya pendidikan yang mahal, namun karena ketatnya persyaratan memasuki pendidikan yang dirasa semakin kompleks dan sulit. Hal ini tentu semakin menambah jumlah orang miskin yang tidak memperoleh kesempatan pendidikan. Keadaan ini seolah memberikan opini bahwa pendidikan hanya untuk orang yang kaya saja atau dengan istilah lain telah terjadi elitisme pendidikan.

Keadaan di atas lebih diperparah lagi bahwa telah terjadi komersialisme di bidang pendidikan. Segala proses penyelesaian pendidikan termasuk sarana yang harus dilengkapi senantiasa berlipat uang dan uang. Maka tidak jarang kemudian pendidikan nya saja. Bukankah pendidikan itu termasuk kelompok organisasi non profit? Memang sekolah bukan monster yang haus akan uang tetapi sekolah memang terus menerus memerlukan biaya. Dalam hal ini muncul premanisme dalam pendidikan baik yang berbentuk investasi ataupun bantuan-bantuan yang sekedar memperoleh keuntungan sepihak dan mengabaikan kepentingan dan maksud pendidikan itu diselenggarakan, yakni pendidikan untuk mencerdaskan bangsa dan membentuk moralitas anak bangsa. Bagaimana hal itu akan terwujud jika para peserta didik dan wali didik berkubang pada kerepotan biaya pendidikan bagi sebagian dan menghitung untung ruginya jika dibandingkan dengan pendapatan ketika memasuki dunia kerja bagi sebagian yang lain. Dalam hal ini timbul permasalahan yaitu benarkah telah terjadi kapitalisme dalam pendidikan?

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan dibatasi pada tiga hal utama yakni tentang pemerataan pendidikan, pendidikan gratis dan kapitalisme pendidikan. Adapun permasalahan-permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

### 1. Pemerataan Pendidikan

- a. Apakah pemerintah telah menjamin bagi semua anak bangsa untuk memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan ?
- b. Apakah alokasi anggaran pendidikan yang sebesar 20% dari APBN itu, telah mampu mengembangkan akses pendidikan untuk memenuhi pemerataan pendidikan bagi semua anak bangsa?
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi *drop out* bagi siswa sekolah dasar?

### 2. Pendidikan Gratis

- a. Bagaimana sebenarnya konsep pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah akhir-akhir ini?
- b. Apakah dengan pendidikan gratis tersebut masyarakat miskin telah tertolong untuk memperoleh kesempatan pendidikan?
- c. Apa dampak pemberlakuan pendidikan gratis bagi sekolah-sekolah negeri pada umumnya dan sekolah swasta pada khususnya.?

### 3. Pendidikan bagi Kaum Elite

- a. Apakah betul pendidikan hanya dinikmati oleh orang kaya saja?
- b. Apakah dengan mahalnya biaya pendidikan sekarang ini memungkinkan terjadinya kapitalisme pendidikan?

## C. PEMBAHASAN

### 1. *Pemerataan Pendidikan*

Isu pemerataan pendidikan menurut Riant Nugroho (2008:34) merupakan turunan dari isu “pemerataan pembangunan”. Masalah pemerataan pembangunan untuk pertama kalinya ditulis oleh Radius Prawiro dalam bukunya “*Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi: Pragmatisme dalam Aksi*” tahun 1998, yang

merupakan buku sejarah era Soeharto. Masalah ini kemudian melahirkan gagasan (konsep) yang terkenal dengan “Trilogi Pembangunan” yakni pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas. Dengan demikian masalah pembangunan bertumpu pada pertumbuhan. Selanjutnya pertumbuhan itu kemudian dibagi dan diratakan. Oleh karena itu pembangunan pendidikan pun dihadapkan pada isu yang sama dengan pembangunan dalam konteks ekonomi.

Pemerataan pendidikan di Indonesia pertama kali secara formal diupayakan oleh Pemerintah semenjak tahun 1984 dengan program wajib belajar sembilan tahun mulai tahun 1994. Tahapan selanjutnya dengan pemberian beasiswa dan melalui gerakan GNOTA yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan hal itu kini pemerintah juga telah menggulirkan program bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak lain ditujukan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan yang tidak saja berkaitan dengan fasilitas pendidikan tetapi juga keberlangsungan pendidikan bagi siswa agar tidak terhenti di tengah perjalanan.

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu *equality* dan *equity*. *Equality* atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama (dalam Eka, R. 2007. *Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia*, <http://edu-articles.com>, diakses tanggal 12 April 2016).

Dekdiknas memberikan indikator pemerataan pendidikan pada tiga hal, yakni peningkatan angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), dan angka partisipasi sekolah (APS). APK didasarkan pada presentase jumlah murid pada satuan pendidikan terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan, APM ditentukan dalam persentase jumlah murid pada usia sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada satuan pendidikan dan APS yakni jumlah siswa pada kelompok usia tertentu yang terepresentasikan pada beberapa satuan pendidikan. Ada indikator utama yang dipahami dalam hal pemerataan pendidikan

yakni jumlah sekolah per penduduk usia sekolah tiap kabupaten/kota dan jumlah guru per sekolah per kabupaten/kota. Riant Nugroho (2008:37-40) juga menambahkan indikator sebagai perluasan indikator di atas yakni jumlah siswa per sekolah, jumlah putus sekolah dan jumlah buta huruf. Namun demikian pemerataan ini pun sangat bergantung pada penyediaan anggaran pendidikan baik dari sumber APBN maupun APBD.

Coleman dalam bukunya *Equality of educational opportunity* bahwa konsep pemerataan meliputi pemerataan pasif yakni pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdapat agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya. Dalam pemahaman seperti ini pemerataan pendidikan menjadi luas yaitu mencakup hal-hal yaitu *equality of access, equality of survival, equality of output, dan equality of outcome*. Dengan demikian saran atas indikator pemerataan itu maka menjadi semakin rumit dan sulit bagi suatu daerah tertentu yang tidak didukung oleh anggaran pendidikan.

Menyadari bahwa anggaran pendidikan secara nasional belum optimal, maka langkah antisipasinya pemerintah melakukan program subsidi yang dimulai dari pendidikan dasar hingga ditingkatkan pada jenjang program pendidikan di atasnya. Langkah selanjutnya adalah pemerintah mengajak kemitraan masyarakat untuk serta memikirkan dan mendukung pembiayaan pendidikan terutama pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). Namun di tengah upaya penggalangan kemitraan tersebut isu kebijakan pendidikan gratis meretas saat pemerataan pendidikan belum sepenuhnya terwujud. Dampaknya sekolah-sekolah swasta saling berlomba mempertahankan proses pendidikannya dengan berbagai upaya yang amat sulit di tengah dilema pendidikan gratis.

## 2. Pendidikan Gratis

Dasar diberlakukannya pendidikan gratis adalah Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 berbunyi : 1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dan 2) wajib belajar merupakan tanggung jawab

negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Juga Undang-undang No. 11 tahun 2009, hakekat kesejahteraan sosial adalah menjamin setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pendidikan yang layak adalah salah satu kebutuhan dasar bagi warga negara. Namun kebijakan-kebijakan pemerintah ini masih menjumpai kendala.

Pendidikan gratis yang terjadi di Indonesia tentu tidak terlepas dari persoalan menyangkut harkat dan martabat bangsa di mata dunia yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Tekad pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa juga menjadi pendorong dalam mewujudkan pendidikan untuk semua. Namun Tilaar (2012:49) menyebutkan bahawa *Education for All* (dirilis pada tahun 1990 melalui konferensi internasional di Thailand-diteruskan pada sidang UNESCO di Dakar tahun 2000) masih dirasakan mengalami kegagalan. Memang, tidak ada penyelenggaraan pendidikan yang gratis itu. Akan tetapi jika yang dimaksudkan *gratis* itu adalah *tidak ada sama sekali beban orang tua atas biaya pendidikan anaknya untuk tingkat pendidikan dasar*, maka hal itu bukanlah hal yang mustahil.

### 3. Kapitalisme Pendidikan

Munculnya kapitalisme pendidikan tidak akan lepas dari aspek politik dan ekonomi. Secara politis akibat berakhirnya perang dunia dan politik negara adi daya yang diperolopori oleh Amerika. Para negara maju yang tergabung dalam *World Trade Organization* (WTO) menandatangani *General Agreement on Trade and Service* (GATS) pada akhir Mei 2005 yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa, salah satunya pendidikan tinggi. Dari konsensus internasional tersebut mendorong para investor bisa memasuki dunia pendidikan yang mengarah pada komersialisasi. Dunia pendidikan dipandang sebagai arena bisnis yang menguntungkan.

Di sisi lain perubahan kebijakan sentralistik menuju desentralistik dipandang memicu timbulnya kapitalisme pendidikan. Misalnya Arif Rohman dan Teguh Wiyono (2010:37-38) membandingkan akibat antara sentralisasi dan desentralisasi pendidikan. Ia menggambarkan bahwa sentralisasi dapat



mengakibatkan stupidifikasi pendidikan lokal akan mendingan lebih baik dari pada desentralisasi yang memunculkan kapitalisasi pendidikan. Sebab kapitalisasi pendidikan menganggap bahwa jasa layanan pendidikan merupakan komoditas yang dapat diperjual-belikan. Akibat lebih jauh kapitalisme pendidikan ini kurang melayani kelompok miskin mayoritas sebaliknya lebih melayani kepada kelompok elite minoritas.

Sayangnya masyarakat menginginkan reformasi dan kebebasan dalam segala hal namun terlanjur kebablasan. Akibatnya terjadi tarik menarik antara kepentingan pemerintah, kelompok masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang saling berseberangan. Wan Anwar mengingatkan bahwa selain kepada para penguasa, politikus, dan birokrat, masyarakat tentu juga menggantungkan harapan kepada pengelola lembaga pendidikan, baik di sekolah-kampus negeri maupun swasta. Sayangnya, mental dan dalih pengelola pendidikan umumnya juga pragmatis dan gampang. "*Daripada menunggu-nunggu dana dari pemerintah, mendingan langsung menggali dana darimasyarakat,*" begitulah kira-kira dalih pragmatis yang lalu diikuti tindakan komersialisasi.

Mu'arif (2008:18-19) menyinggung bahwa dengan adanya otonomi pendidikan mendorong manajemen sekolah dilakukan dengan sistem manajemen profit. Hal ini didukung pula dengan kebijakan pemerintah agar sekolah di daerah menyelenggarakan program sekolah unggulan yang menuntut pembiayaan yang tidak sedikit. Akibatnya hanya anak dari orang kaya saja yang bisa memasuki program unggulan tersebut. Oleh karena itu Muhammad Saroni (2010:25) mengingatkan agar kini saatnya merubah paradigma pemikiran "sekolah mahal". Namun ia menegaskan bahwa anak dari keluarga kaya justru menguasai sekolah-sekolah negeri, sementara anak dari keluarga miskin menempuh pendidikannya di sekolah swasta. Dengan begitu orang kaya menanggung biaya pendidikan lebih ringan dari pada orang miskin.

Akibat dari adanya kapitalisme pendidikan Eko Prasetyo (2011:30) dalam bukunya yang berjudul "*Orang Miskin Dilarang Sekolah*" melukiskan bahwa liberalisasi pendidikan hanya akan membawa sekolah meluluskan para pengangguran yang pada gilirannya akan menambah populasi kemiskinan yang ia

lukiskan sebagai *spiral kemiskinan yang tak berujung*. Bahkan ia melukiskan bahwa orang miskin di siksa di negeri sendiri dengan sindiran “*kenapa aku tidak boleh sekolah pak*”, tutur orang miskin.

#### 4. Analisis PEST

Untuk memperoleh solusi terhadap persoalan yang sedang dihadapi kaitannya dengan pemerataan pendidikan, penulis mencoba melakukan analisis dengan pendekatan struktur analisis PEST (politik, ekonomi, sosial, dan teknis) yang biasa digunakan dalam marketing yang dikemukakan oleh Housden (1994:15-16) dalam bukunya “*Successful Marketing Research*”.. Keempat bidang analisis tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut.

##### a. Bidang Politik

Secara politik kebijakan membuat dan mengatur pendidikan sudah sepantasnya menjadi kewajiban pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus benar-benar mewujudkan kebijakan pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam hal ini pemerataan pendidikan harus mencakup dua aspek penting yaitu *equality* dan *equity*. Pendidikan dikatakan merata apabila semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sedangkan pendidikan dikatakan adil jika antar kelompok (semua lapisan masyarakat) bisa menikmati pendidikan secara sama. Dalam pembuatan kebijakan pendidikan gratis, maka pemerintah juga harus melakukan penyediaan anggaran pendidikan (minimal 20%) yang dapat memenuhi program tersebut secara tepat. Jangan sampai program pendidikan gratis hanya menjadi slogan dan janji-janji manis yang kerap dipakai tatkala ada pemilihan kepala daerah atau presiden.

Program wajib belajar 9 tahun hendaknya pemerintah menangani secara serius dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk turut serta (partisipasi) baik aktif maupun pasif dalam mengelola akses pendidikan dasar dan pra sekolah secara simultan. Kebijakan wajib belajar 9 tahun ini agar menjadi kebijakan serentak pemerintah pusat dan daerah bagi anak bangsa tanpa memandang dari golongan kaya atau miskin.

HM. Zainuddin (2008:50) menyitir pendapat McGinn dan Welsh bahwa motif desentralisasi dalam pendidikan baru bertumpu pada aspek politis, pembiayaan dan efisiensi dan belum mengarah pada motif pemberdayaan sosial dan demokratisasi pendidikan. Persoalan pandangan pendidikan masih belum seimbang. Tilaar (2000:59) misalnya mencotohkan bahwa demokratisasi pendidikan ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan. Pendidikan negeri masih menjadi favorit karena seakan-akan tidak memerlukan biaya

#### **b. Bidang Ekonomi**

Banyaknya anak usia 7-15 tahun yang putus sekolah harus segera ditangani baik oleh pemerintah maupun masyarakat dengan cara pemberian bantuan dalam berbagai bentuk. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan beasiswa dari pemerintah yang selama ini telah berjalan agar lebih ditingkatkan dan diintensifkan baik dalam kuantitas maupun kualitasnya sehingga dapat menolong masyarakat miskin agar memiliki kesempatan pendidikan sebagaimana orang yang kaya. Maraknya pendidikan yang cenderung mahal akhir-akhir ini, maka pemerintah melakukan terobosan dengan menggalakan kemitraan dari berbagai sponsor terutama lembaga swasta untuk dapat memberi subsidi kepada yang kurang mampu dalam menuntaskan belajar anak-anak mereka.

Mengingat pendidikan pasti membutuhkan dana, maka pemerintah juga harus berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi sehingga para lulusan baik tingkat SLTA maupun perguruan tinggi tidak menjadi pengangguran. Dalam hal ini lapangan kerja harus diciptakan secara bersama-sama antara pemerintah dan lembaga swasta. Dengan demikian masyarakat akan meningkatkan swasembada untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dasar dan pra sekolah.

Komersialisasi pendidikan jenis ini perlu didukung karena kita harus menyadari bahwa masyarakat kita terdiri dari berbagai segmen ekonomi yang berbeda. Menyediakan perguruan tinggi dengan biaya mahal dan bertaraf internasional berarti kita telah menarik masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam finansial untuk menyekolahkan anak mereka di dalam

negeri dan tidak lagi harus ke luar negeri. Ini akan mencegah masuknya devisa negara kita ke negara asing dan sangat membantu perekonomian Indonesia.

**c. Bidang Sosial**

Untuk mendukung program ketuntasan belajar 9 tahun, maka pemerintah juga harus berupaya melibatkan semua komponen bangsa dari berbagai kalangan untuk merubah pola hidup, pola pikir dan perilaku masyarakat yang akhir-akhir ini disinyalir cenderung malas. Masyarakat sekarang ini dilanda oleh sikap hidup pragmatis dan konsumtif. Masyarakat terkadang bahkan sering tampak mengeluarkan uang demi pembelian barang keperluan rumah tangga secara berlebihan. Gaya hidup yang didominasi oleh pengaruh *intertainment* juga menyebabkan pemborosan, misalnya seseorang dengan susah payah mendapatkan keuangan justru untuk foya-foya atau mempercantik dirinya dengan bangganya. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, mereka masih keberatan dan mengaku tidak mampu. Mental masyarakat berubah menjadi mental pengemis.

Hidup sosial bertetangga dan saling menolong serta rasa berbagi sesama khususnya kepada yang membutuhkan sulit diwujudkan karena orang kaya hanya ingin memuaskan dirinya sendiri (*individual hedonism*). Dari sinilah kesenjangan sosial (gap antara kaya dan miskin) semakin jelas, sehingga tindakan anarkis, kriminalitas dan penindasan bagi si miskin akan mudah terjadi. Sikap masyarakat cenderung kepada perbuatan yang menimbulkkan disintegritas bangsa, rasa persatuan kesatuan dan saling menghormati sesama warga semakin mahal harganya.

Untuk itu diperlukan kearifan pemerintah dalam setiap menangani permasalahan sosial masyarakat yang semakin bertambah dan kompleks. Dalam hal penyaluran dana bantuan pendidikan, pemerintah juga belum secara tegas dan adil berdasarkan hukum yang berlaku menindak para preman dalam pendidikan.

#### **d. Bidang Teknik**

Program penuntasan belajar dan pemerataan pendidikan di segala jenjang/ tingkat sejak pra sekolah hingga perguruan tinggi harus betul-betul dikawal, dipantau dan diawasi pelaksanaannya dengan melibatkan pemerintah bersama-sama komponen masyarakat. Begitu juga dalam pengawasan program pendidikan gratis dan penyaluran BOS, pemerintah dan segenap komponen bangsa yang terkait bertindak secara jujur, adil dan tegas. Praktik korupsi dan pungutan liar (pungli) yang menyangkut biaya penyelenggaraan pendidikan harus dicegah dan bilamana perlu ditindak tegas berdasarkan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku tanpa memandang bulu.

Kemitraan pemerintah daerah dengan pihak swasta (dalam hal ini perusahaan) agar lebih ditingkatkan salah satunya menurut Isjoni (2006:44) agar perusahaan mempunyai naluri manusiawi untuk membangun pendidikan di daerah termasuk membantu dukungan bantuan dan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan.

#### **D. KESIMPULAN**

Pemerataan pendidikan menjadi hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Pemerintah melalui perundang-undangan mengatur sedemikian rupa agar warga negara memperoleh kesempatan pendidikan. Namun demikian persoalan silih berganti mengiringi usaha dalam mewujudkan pemerataan pendidikan tersebut. Permasalahan yang muncul tidak terlepas dari apa yang menjadi landasan pendidikan itu dibuat baik yang menyangkut falsafah atau ideologi, keadaan ekonomi dan sosial budaya masyarakat dan bangsa, serta peranan politik yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Oleh karena itu pemerintah 1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti, 2) memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai, 3) melakukan

pembaharuan dan pematapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen, 4) mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya, 5) memberikan subsidi pendidikan bagi sekolah swasta agar sekolah-sekolah swasta mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau masyarakat luas, 6) menerapkan alternatif layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang beruntung (masyarakat miskin, berpindah-pindah, terisolasi, terasing, minoritas, dan di daerah bermasalah, termasuk anak jalanan), seperti SD dan MI kecil satu guru, guru kunjung/sistem tutorial, SD Pamong, SD-MI terpadu, kelas jauh, serta SLTP-MTs terbuka; dan 7) memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan/atau dari keluarga yang tidak mampu, dengan mempertimbangkan peserta didik perempuan secara proporsional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Wan, *Komersialisasi dan Tanggung Jawab Pendidikan: Sekelumit Pembicaraan*, dalam jurnal *Insania* Vol. 13 Nomor 3 1 Sep-Des 2008 hal 399, Purwokerto: P3M STAIN Purwokerto.
- Isjoni, 2006. *Dari Substansi Ke Praksis: Pokok-Pokok Pikiran Meningkatkan Kualitas Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kahar, Irawati A, 2007. *Komersialisasi Pendidikan di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jurnal *Historisme* Edisi Nomor 23 Tahun XI Januari 20017. Universitas Sumatera Utara, hal. 50-51
- Mu'arif, 2008. *Liberalisasi Pendidikan: Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Prasetyo, Eko. 2011. *Orang Miskin Dilarang Sekolah*, Yogyakarta: Resist Book.
- Rohman, Arif & Wiyono, Teguh, 2010. *Education Policy in Decentralization Era*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saroni, Muhammad, 2010. *Orang Miskin Harus Sekolah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group.

- Tilaar, 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_, 2012. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zainuddin, 2008. *Reformasi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.